

GLOBALISASI, LIBERALISASI DAN DAYA SAING SEKTOR PERTANIAN

Soetatwo Hadiwigeno

Abstract

As we know that the globalization and liberalization process have impact in many aspects, economic and social problems. Indonesia as a developing country will get negative effect, especially the loss of opportunity in export of agriculture products because of its low competitiveness. The government must develop an appropriate policy to solve this problem.

PENGANTAR

Pengertian paling mendasar dari proses globalisasi adalah perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, jasa dan keuangan antar negara-negara di dunia. Dalam dasawarsa terakhir ini proses globalisasi dan integrasi telah mengalami akselerasi karena dorongan universal untuk liberalisasi dan perubahan teknologi pada berbagai bidang sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap akselerasi internasional produksi dan distribusi. Berbagai indikator yang sering digunakan sebagai ukuran globalisasi adalah rasio perdagangan luar negeri terhadap pendapatan nasional, rasio antara penanam modal asing terhadap pendapatan nasional dan trend pertumbuhan arus modal. Semua indikator tersebut secara agregat mengukur tingkat keterlibatan antar negara dalam kurun waktu ini telah meningkat sebesar tiga kali lipat dari periode sebelumnya dan dua kali lebih cepat dari era perdagangan emas pada tahun 1960-an. Sedangkan rasio PMA/PDB meningkat dua kali lebih besar dari era sebelumnya, sedangkan jumlah PMA yang masuk ke negara-negara berkembang meningkat sekitar 30 % dari era sebelumnya. Bahkan di era selanjutnya diperkirakan proses integrasi internasional terus akan mengalami akselerasi yang lebih besar dengan adanya perkembangan

keterbukaan informasi dan komunikasi yang lebih besar. Tingkat integrasi serta variasi pertumbuhan ekonomi di antara negara berkembang akan bervariasi, tergantung dengan kondisi serta kebijakan masing-masing negara dalam mengantisipasi dan menghadapi proses globalisasi. Oleh karena itu untuk dapat mengambil keuntungan dari adanya proses globalisasi tersebut, maka setiap negara harus mampu mengambil kebijakan yang tepat di berbagai bidang.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG GLOBALISASI

Faktor utama yang mendukung adanya proses globalisasi adalah adanya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang semakin besar dan tak mampu disediakan sendiri oleh masing-masing negara tersebut. Kemudian dengan adanya keterbukaan informasi dan komunikasi antar anggota masyarakat di seluruh dunia, maka halangan dan keterbatasan yang menghambat hubungan masing-masing negara menjadi semakin hilang. Begitu pula tuntutan masyarakat terhadap pengurangan hambatan perdagangan yang sering dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing negara juga merupakan faktor yang cukup penting. Proses ini, yang kemudian populer dengan istilah liberalisasi

mencakup sektor perdagangan dan keuangan. Pada umumnya proses ini dimulai dengan penurunan hambatan tradisional, yaitu hambatan dalam bentuk tarif dan non-tarif di pasar barang. Pada akhirnya proses liberalisasi juga terjadi dalam konteks unilateral, regional dan multilateral serta mencakup pengurangan hambatan lintas negara (*cross border barriers*) dan juga termasuk sektor jasa-jasa, proses fasilitas lain (*non cross border barriers*), aturan main internasional dan bahkan membebaskan arus faktor produksi (Pangestu dan Setiati, 1997)

Dorongan liberalisasi universal pada gilirannya didorong oleh berbagai kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang serta perkembangan hubungan antar negara yang terjadi secara simultan. Dorongan tersebut adalah, *pertama*, liberalisasi yang disebabkan oleh proses penyesuaian dan restrukturisasi oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) sebagai respons terhadap memburuknya keadaan lingkungan internasional. *Kedua*, aturan dan perjanjian multilateral yang berkembang dibawah naungan GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) dan WTO (*World Trade Organization*). *Ketiga*, kerjasama regional seperti APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*). Kerjasama ekonomi regional tersebut mencakup negara-negara yang berada di dalam satu kawasan dan pelaksanaannya telah meningkat dengan tajam sejak tahun 1980-an.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian dalam era persaingan yang semakin "terbuka", kita berada dalam lingkungan strategik yang baru. Salah satu lingkungan strategik baru yang akan mempengaruhi strategi dan kebijaksanaan yang akan kita ambil adalah proses yang sedang kita jalani yaitu globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Proses liberalisasi perdagangan,

yang merupakan suatu proses untuk mempermudah perdagangan barang dan jasa dengan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti hambatan tarif dan hambatan non tariff seperti : larangan impor, import quota, importir tunggal dsb, mau tidak mau harus dihadapi dan diantisipasi. Persetujuan GATT, sebagai salah satu aspek proses liberalisasi perdagangan diadakan untuk membentuk kerangka kerja dan acuan yang transparan yang dapat dipakai menurunkan hambatan – hambatan perdagangan. Adapun prinsip-prinsip yang dianut dalam perdagangan bebas meliputi *Non-Discriminations, Reciprocity, Transparency, Tariff Reduction*. Salah satu komponen penting dalam kesepakatan *Uruguay Round* dalam proses perundingan perdagangan multiteral adalah dimasukkannya sektor pertanian dalam GATT. Sebagai negara agraris, kita perlu mendalami apa yang diatur dalam kesepakatan tersebut, untuk kita ambil manfaat dan peluangnya, dengan kita refleksikan kedalam kebijaksanaan yang akan kita ambil

Akselerasi Globalisasi

Poses liberalisasi akan berlangsung terus dalam dekade yang akan datang dan merupakan perubahan fundamental yang akan bergulir terus sehingga akan terjadi persaingan yang ketat antar NSB, maupun negara maju dalam akses modal, teknologi dan pasar. Perlu juga disadari bahwa proses reformasi akan mencakup lebih dari penurunan hambatan tradisional seperti tarif dan tata niaga impor di pasar barang yang biasanya diketahui umum (seperti lisensi dan kuota). Pembukaan akses pasar dan investasi serta pembebasan arus tenaga profesional, juga akan mulai dialami dengan perjanjian untuk liberalisasi sektor jasa-jasa. Persiapan NSB harus dilakukan untuk menciptakan perangkat hukum dan implementasi peraturan-peraturan yang konsisten dengan norma

internasional di berbagai bidang seperti perlindungan hak atas kepemilikan intelektual, prosedur bea cukai dan anti dumping, penentuan standar-standar barang dan jasa, dan penyelesaian sengketa dagang. Juga perlu disadari bahwa banyak hal yang dahulu dapat dilakukan sekarang telah dianggap melanggar norma internasional, seperti syarat kandungan lokal dan subsidi ekspor serta kebijakan pembebasan pajak pada produk tertentu..

Proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh NSB yang akan terjadi dalam masa transisi yang akan dialami dalam jangka menengah dapat menimbulkan tekanan-tekanan untuk mempertahankan perlindungan untuk sektor-sektor tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu. Politik ekonomi perdagangan dan investasi internasional akan menciptakan keadaan yang tampaknya ambivalen dan perlu kecenderungan proteksi dan penghambatan transaksi internasional yang lain, baik oleh negara maju atau NSB, melalui tindakan sepihak dan cara lain untuk melakukan proteksi (misalnya *antidumping*, standar, mengkaitkan aspek non-ekonomi seperti hak-hak buruh kepada akses pasar dan lain-lain) patut diwaspadai. Menjamin iklim internasional yang terbuka dan berdasarkan aturan main yang jelas merupakan kepentingan semua, terutama karena pertumbuhan NSB seperti Indonesia sangat tergantung kepada akses pasar dunia yang terbuka. Namun karena proses liberalisasi dan perubahan akan bergulir terus, maka sangat penting bagi negara-negara yang menjalankan liberalisasi, khususnya NSB untuk melakukan antisipasi yang tepat dengan berbagai perangkat kebijakan ekonomi maupun non ekonomi yang depart diterima secara internasional.

Kemajuan teknologi akan berkembang untuk mendorong proses globalisasi produksi barang maupun jasa. Pada akhirnya

kunci keberhasilan untuk bersaing terletak pada kemampuan dan kapabilitas teknologi serta kemampuan melakukan adaptasi serta inovasi yang dilakukan oleh masing-masing negara. Untuk dapat bersaing secara global, perusahaan senantiasa memerlukan pembaruan dan perbaikan teknologi yang digunakan, fleksibilitas supaya mudah melakukan perubahan, perancangan produk yang lebih sesuai dengan pembeli (seperti *customized vs mass production*), dan keterkaitan atau jaringan *supplier* yang luas. Secara bertahap, produksi massal dari produk standar, pembagian antara produk yang ketat, dan pemusatan produksi di satu lokasi akan berkurang. Pola keterkaitan yang strategis juga sangat penting untuk mempertahankan daya saing dimana aliansi strategi dapat berlangsung antara pesaing, melalui perusahaan patungan, keterkaitan dengan kontraktor, lisensi, perjanjian teknologi atau teknis, penyediaan jasa, pemasaran dan lain-lain. Perusahaan global memantau semua negara untuk memperoleh kombinasi penggunaan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang paling unggul dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan pemasaran (lihat juga Pangestu, 1997).

Kemajuan Teknologi di Bidang Produksi dan Perdagangan

Seperti yang telah diketahui secara umum, teknologi yang menyebabkan penurunan biaya transportasi dan komunikasi telah mengurangi jarak antar negara karena penurunan biaya transaksi barang-barang, jasa-jasa, uang, orang dan informasi antar negara. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi pada gilirannya telah mendorong proses internasionalisasi produksi barang dan jasa, serta pemasaran dan penyalurannya. Pada dasarnya yang terjadi adalah peningkatan spesialisasi dan pembagian proses produksi antara negara ber-

dasarkan produk, tipe produk, dan tahap proses produksi. Proses pembagian tahap produksi antar negara merupakan salah satu dasar keberhasilan negara-negara Asia Timur dimana relokasi industri telah terjadi secara bertahap. Perubahan teknologi perancangan dan produksi juga telah menyebabkan siklus produksi menjadi lebih pendek dan memungkinkan lebih banyak produk dibuat (*product differentiation*). Perkembangan teknologi informasi dan manajemen telah juga memperbaiki pengendalian mutu, pengurangan pembuangan (*wastage*) yang terjadi dalam proses produksi, dan mengurangi keperluan untuk penyediaan stok yang tinggi. Peningkatan efisiensi dan kecepatan teknologi informasi misalnya sangat mendukung *just in time management* daripada pengadaan dan stok karena memungkinkan dan melancarkan hubungan antara perancang, *supplier*, produsen dan pengecer. Teknologi komunikasi dan teknologi informasi juga sangat berperan dalam meningkatkan integrasi sektor finansial. Sebagian besar transaksi finansial dapat dilakukan seketika 24 jam sehari dan sulit sekali untuk mengendalikan arus modal masuk dan keluar secara pesat (Pangestu, 1997). Dengan demikian kestabilan keadaan makroekonomi dan konsistensi kebijaksanaan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang pasti dan transparan menjadi bertambah penting dalam era globalisasi informasi dan arus modal.

Seperti dijelaskan oleh Pangestu (1997), sejak awal 1990-an telah terjadi ledakan dan pertumbuhan pesat arus dana ke NSB, terutama dari swasta. Pola utama yang dialami adalah bahwa disatu pihak pertumbuhan bantuan luar negeri dari negara donor rendah dan nilai bantuan yang diberikan relatif konstan. Di lain pihak telah terjadi ledakan modal swasta yang ditujukan ke NSB, terutama yang dianggap layak. Ciri-ciri modal swasta tersebut adalah berubahnya jenis

arus modal swasta dari pinjaman menjadi ekuitas ; berubahnya sumber modal dari sektor perbankan ke sektor nonbank (portofolio, PMA) ; dan bahwa sebagian besar peningkatan dana tersebut ditujukan ke "emerging" yaitu "economies creditworthy". Beberapa faktor pendorong dari ledakan modal swasta ke NSB adalah turunnya tingkat suku bunga AS di awal 1990-an ; perubahan sikap institusional di negara maju terhadap *emerging markets* ; proses privatisasi, liberalisasi dan reformasi yang dilakukan di NSB pada saat yang bersamaan. Untuk jangka menengah ke depan, arus modal swasta diperkirakan akan terus meningkat, terutama ke negara-negara yang *credit worthy*. Dengan demikian, sangatlah penting untuk negara yang menginginkan arus modal tersebut untuk menjalankan kebijaksanaan makro yang stabil dan konsisten, pengembangan sektor finansial yang efisien dan stabil, transparansi informasi, kepastian hukum dan seterusnya.

Ketersediaan bantuan luar negeri akan tidak banyak meningkat, sementara yang memerlukan bertambah banyak, khususnya negara-negara Asia yang dilanda krisis ekonomi pada tahun-tahun terakhir ini. Proses privatisasi, termasuk untuk prasarana fisik, juga berarti bantuan luar negeri akan dipusatkan untuk hal-hal tertentu seperti mengatasi kemiskinan, lingkungan hidup dan pendidikan. Potensi pertumbuhan ekonomi NSB yang lebih pesat dari negara maju menjadi pasar yang potensial bagi pemasaran produk maupun alokasi sumber daya lainnya. Hal tersebut berarti pengaruh pertumbuhan NSB dapat mempengaruhi negara maju, sehingga akan ada peningkatan keterkaitan diantara keduanya.

PARADIGMA PEMBANGUNAN

Studi-studi yang dilakukan tentang perbandingan pertumbuhan dan pembangunan NSB berkesimpulan bahwa ada

beberapa faktor penting yang menyebabkan keberhasilan pertumbuhan tinggi (misalnya di kawasan Asia Timur). Misalnya menurut Sachs dan Warner (1995), ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan pertumbuhan tinggi yang di alami suatu negara (lihat Pangestu, 1997) :

1. Kebijakan Ekonomi yang Tepat, yang terdiri dari :

- Kebijakan orientasi/promosi ekspor atau keadaan yang menuju perdagangan bebas untuk eksportir sangat penting. Perekonomian yang terbuka seperti yang tercermin dari akses kepada input, akses kepada modal dan promosi PMA, dan tidak ada hambatan untuk devisa, serta prasarana yang mendukung dan fasilitas pendanaan mengalami kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari ekonomi yang menganut kebijakan tertutup ;
- Tingkat tabungan masyarakat dan pemerintah yang tinggi (dicerminkan oleh anggaran belanja yang surplus dan tidak memberlakukan program jaminan sosial yang menyeluruh seperti negara-negara maju) ;
- Prasarana hukum dan transparansi : birokrasi yang efektif, transparansi, mengindahkan hak milik pribadi (*private property rights*), lembaga hukum dan lain-lain mempengaruhi lokasi dan pertumbuhan investasi ;
- Investasi dalam SDM ;
- Pemantauan kepada pesaing dan fleksibilitas untuk terus menarik investor.

2. Kondisi Awal

Fenomena *conditional convergence* : yaitu kalau suatu perekonomian mulai dengan tingkat pembangunan ekonomi

yang rendah, negara tersebut akan mengalami pertumbuhan tinggi karena akumulasi modal, teknologi dan lain-lain yang pesat. Dengan pendalaman struktur, pertumbuhan akan dengan sendirinya menurun karena proses akumulasi tidak akan terjadi sepesat pada awal proses pembangunan. Misalnya di Jepang pada saat ini pertumbuhan rata-rata sudah menurun dan lebih mendekati pertumbuhan yang dialami Eropa dan AS. Menurut Sachs dan Warner (1995), perbandingan pertumbuhan antara negara menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan dua kali lipat dari pendapatan per kapita setelah tingkat tertentu (kira-kira \$ 3.000 - 5.000/kapita), pertumbuhan akan turun 1,25 persen.

Masalah yang sangat penting dari paradigma pembangunan ke depan dengan peningkatan liberalisasi adalah peninjauan ulang dari peran pemerintah dalam pembangunan. Peran pemerintah beralih dari regulator dan pelaku langsung, menjadi bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif (penurunan ekonomi biaya tinggi, transparansi, persaingan sehat dan lain-lain) dan melakukan investasi prasarana yang mendukung swasta seperti transportasi, komunikasi dan peningkatan kualitas SDM. Liberalisasi akan menimbulkan kebijaksanaan pemerintah akan berkurang. Oleh karena itu kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah harus konsisten dan jelas arahnya. Faktor lainnya adalah suatu visi pembangunan untuk didasari perencanaan dan strategi yang dinamis dan dirancang untuk jangka menengah dengan pencapaian target yang jelas dan realistik. Kebijakan perencanaan harus didasarkan pada konsep *coorporate plan*. Setiap tahap pembangunan harus didasarkan pada *cost* dan *returnnya*. Tidak kalah pentingnya untuk memikirkan tahap-tahap pembangunan yang harus dijalankan dalam kurun waktu tertentu, dan

tahap-tahap yang dijalankan. Perencanaan tersebut harus jelas dan transparan sehingga semua lapisan masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap perilaku pemerintah dengan berbagai macam birokrasinya.

PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

Seperti dijelaskan oleh Saragih (1997), data perkembangan PDB terus menunjukkan penurunan pangsa sektor pertanian dari sekitar 40 persen pada tahun 1969 menjadi 17,6 persen pada tahun 1993 dan menurut analisis Bank Dunia, tinggal 10,5 persen pada tahun 2005. Apakah hal ini wajar-wajar saja karena semua negara yang sebelumnya berbasis pertanian juga mengalami perubahan struktural yang sama? Selanjutnya, menurut analisis Bank Dunia tersebut, PDB per kapita tahun 1994 mencapai US \$ 919 yang akan meningkat menjadi US \$ 2.250 pada tahun 2005. Tidak jelas bagaimana perbandingan PDB per tenaga kerja menurut sektor yang tentunya bisa menjelaskan arti yang lebih mendalam dari perubahan struktural. Dalam suatu seminar tentang produktivitas nasional disebutkan bahwa pada tahun 1990, produktivitas tenaga di sektor pertanian "hanya" Rp 632.000 sedangkan disektor non pertanian sebesar Rp 2.591.000. Selanjutnya disebutkan bahwa produktivitas sektor pertanian tersebut "hanya" 39 persen dari produktivitas nasional sedangkan angka untuk sektor non pertanian telah mencapai sekitar 160 persen. Apakah merosotnya pangsa sektor pertanian disertai rendahnya produktivitas sektor pertanian tersebut sesuatu yang pantas menjadi keprihatinan, atau bahkan *sudah menjadi beban pembangunan*? Sebelum menetapkan paradigma baru pembangunan, masalah ini perlu dituntaskan terlebih dahulu sebab pada dasarnya paradigma baru

dibutuhkan jika melalui berbagai kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan yang telah ditempuh sejumlah harapan-harapan secara serius tidak tercapai atau telah terjadi berbagai distorsi ke arah yang kurang menguntungkan. Untuk itu akan dibahas dulu konsep "agribisnis" sebagai cara baru melihat sektor pertanian. Kemudian dengan konsep itu dikaji peranan agribisnis (*agribusiness network*) bisa saja terjadi suatu struktur kelembagaan pasar yang kurang menguntungkan bahkan anti pertumbuhan dan anti pemerataan seperti monopoli, monopsoni dan semacamnya.

Kontribusi subsektor lapangan usaha tanaman bahan makanan dan kehutanan telah menurun dari masing-masing 60,8 dan 10,9 persen dalam NTB sektor pertanian pada tahun 1985 menjadi masing-masing 53,2 dan 10,2 persen pada tahun 1995. Sementara itu kontribusi subsektor lapangan usaha tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan telah meningkat dari masing-masing 11,6 persen; 8,9 persen; dan 7,8 persen menjadi 16,1 persen, 10,9 persen, dan 9,5 persen.

Seperti halnya yang dijelaskan Anwar, (1997), jika dilihat dari segi permintaan, terutama kalau kita memperhatikan (1) komposisi dan tingkat konsumsi per kapita berbagai barang yang tercakup dalam subsektor lapangan usaha bahan makanan dan peternakan; (2) elastisitas permintaan terhadap kenaikan pendapatan untuk berbagai jenis barang tersebut; dan (3) laju pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita di Indonesia selama periode 1985-1995, maka diperkirakan penurunan kontribusi subsektor lapangan usaha tanaman bahan makanan terlalu cepat, sedangkan peningkatan kontribusi subsektor lapangan usaha peternakan terlalu lambat. Perkiraan ini lebih diperkuat dengan melihat menu runnya kontribusi subsektor lapangan usaha tanaman bahan makanan dan peternakan terhadap PDB dari masing-masing 14,7 dan

2,1 persen pada tahun 1985 menjadi 8,6 dan 1,8 persen tahun 1995 (lihat Tabel 1 dan 2.).

KONSEP PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN AGRIBISNIS

Konseptualisasi Agribisnis

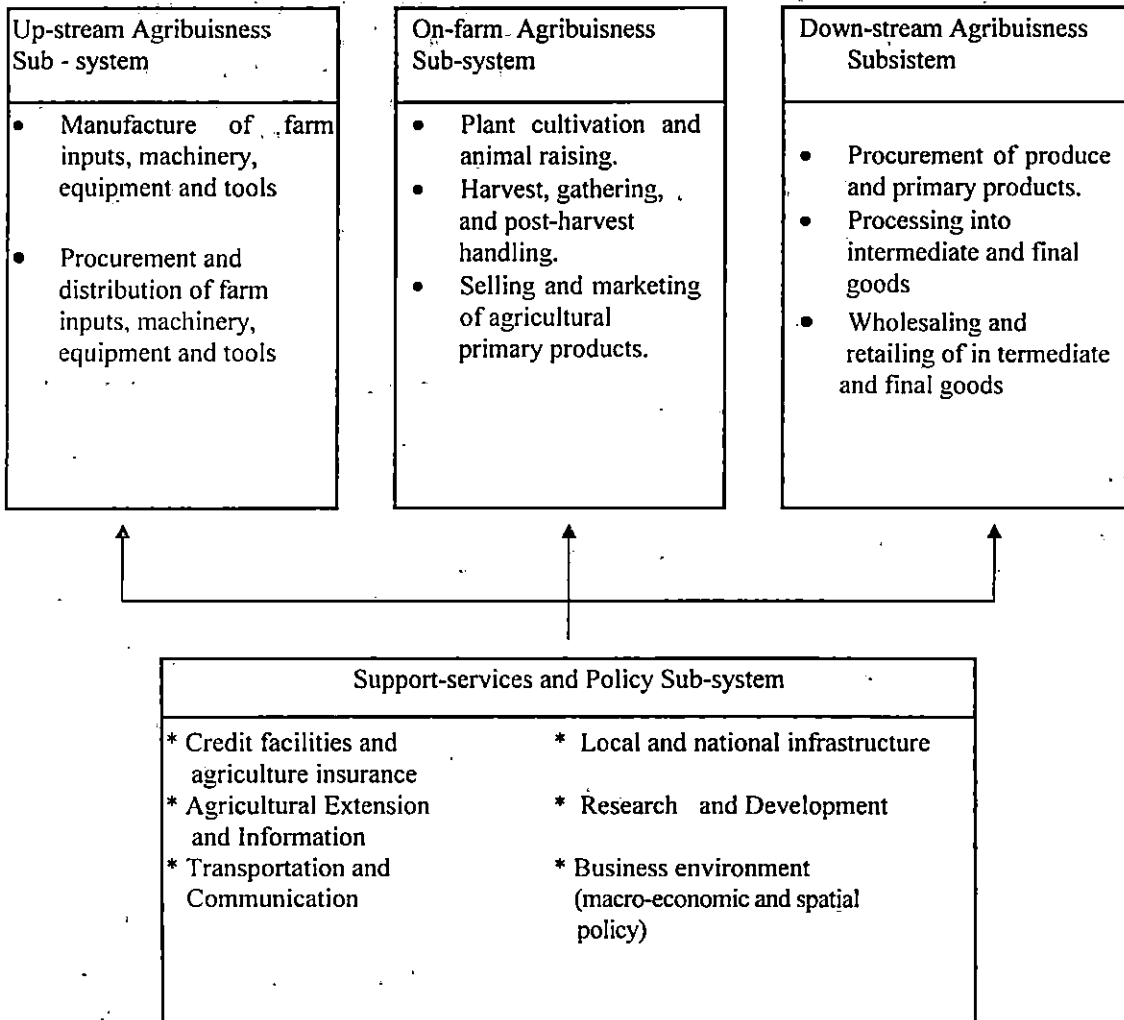
Konsep agribisnis telah dipekenalkan pertama kali oleh Drilon Jr., (1971), secara khusus di Asia Tenggara, sebagai ... *the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm, and storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them.* Dengan konsep yang sederhana namun cukup revolusioner tersebut, kita bisa melihat keterkaitan antara berbagai subsistem dalam agribisnis yaitu : *on-farm agribusiness dan off farm agribusiness* yang meliputi *up-stream agribusiness* dan *down stream agribusiness* yang meliputi *up-stream agribusiness* dan *down stream agribusiness*. Lebih lanjut, berbagai komponen dalam subsistem agribisnis dapat dilihat melalui gambar 1. Apabila selama ini ada kecenderungan melihat pertanian itu hanya pada *on-farm agribusiness* saja maka dengan konsep agribisnis tersebut kita mampu melihat pertanian dalam wawasan yang lebih luas (lihat Saragih, 1997). Dijelaskan pula, bahwa pertanian dalam wawasan agribisnis mempunyai implikasi yang sangat penting. Diantaranya adalah agribisnis hulu yang dalam perekonomian kita termasuk dalam industri kimia (seperti pupuk dan bahan-bahan pestisida, herbisida, intektisida, dan sebagainya) serta industri otomotif dan logam (traktor, mesin-mesin dan alat-alat pertanian). Pada dasarnya produk-produk tersebut merupakan *derive demand* dari kegiatan *on-farm* pertanian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada

agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), terlihat kegiatan-kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian (agroindustri) serta perdagangan hasil-hasil pertanian mentah maupun olahan, baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri. Dalam *support-services* atau layanan pendukung untuk kegiatan *on-farm*, terlihat pula peranan dari lembaga keuangan (kredit dan asuransi), jasa penyediaan informasi, transportasi, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Sampai sejauh mana sebenarnya sumbangan atau peranan agribisnis itu dalam perekonomian nasional ?

Agribisnis dalam Perekonomian Nasional

Dalam Saragih (1997) dijelaskan bahwa kalau dilihat struktur makro-ekonomi kita, dengan perbedaan yang mencolok dalam laju pertumbuhan antarsektor, maka sumbangan sektor pertanian dalam PDB tahun 1993 tinggal 17,6 persen (menurut harga tetap). Pada PDB tahun 1993 itu, sumbangan subsektor tanaman pangan 10,3 persen ; subsektor perkebunan rakyat, 2,5 persen ; subsektor perkebunan besar, 0,6 persen ; subsektor peternakan, 2,0 persen ; subsektor perhutanan dan perburuan, 0,7 persen ; serta subsektor perikanan 1,5 persen. Kalau dilihat dalam struktur ekspor nasional, dalam sepuluh tahun terakhir, sumbangan produk primer pertanian itu dalam total ekspor berflutuasi sekitar 6 sampai 11 persen setiap tahunnya ; sedangkan dalam ekspor nonmigas, telah merosot menjadi sekitar 9 sampai 10 persen, yang pada awal PJP I adalah primadona ekspor nonmigas. Terlepas dari bagaimana mendefinisikannya, apabila produk primer pertanian digabung dengan produk olahannya (produk agroindustri hilir) maka sumbangannya dalam total ekspor bisa sekitar 25 sampai 30 persen ; sedangkan dalam ekspor

Gambar 1.
KONSEPTUALISASI AGRIBUSINESS



Sumber : Saragih (1997: 106)

nonmigas sekitar 40 sampai 50 persen. Apabila dalam ekspor ini dimasukkan kegiatan agribisnis hulu maka sumbangan atau peranan agribisnis dalam ekonomi nasional ini, secara khusus ekspor, bisa menjadi lebih tinggi pula.

Efek pengganda nilai tambah (*value-added multiplier*) agroindustri adalah 3,23 atau setiap penambahan Rp 1 nilai tambah akan menciptakan (*generate*) nilai tambah di berbagai sektor yang terkait sebesar Rp 3,23. Angka efek pengganda ini secara konsisten terus mengalami peningkatan yakni : tahun 1975, 0,83 ; tahun 1980, 2,24 ; tahun 1985, 2,31 ; dan tahun 1990, 2,91. Disamping itu, efek pengganda nilai-tambah beberapa subsektor pertanian juga menunjukkan peningkatan yang sangat nyata. Efek pengganda nilai tambah subsektor perkebunan meningkat dari 0,964 pada tahun 1971 menjadi 2,996 pada tahun 1990 ; efek pengganda nilai tambah subsektor peternakan meningkat 0,99 pada tahun 1971 menjadi 2,944 pada tahun 1990 : serta efek pengganda subsektor perikanan meningkat dari 0,984 menjadi 2,206 pada tahun 1990. Tetapi efek pengganda subsektor pertanian tanaman pangan dan perhutatan meningkatnya lebih rendah yakni : subsektor tanaman dari 0,976 pada tahun 1971 menjadi 1,697 pada tahun 1990 serta efek pengganda subsektor kehutanan meningkat dari 0,984 pada tahun 1971 menjadi 1,985 pada tahun 1990.

Kalau efek pengganda nilai tambah terus mengalami perbaikan, maka efek pengganda kesempatan kerja (*employment multiplier*) terus mengalami penurunan yakni : tahun 1971, 6,87 ; tahun 1975, 2,98 ; tahun 1980, 0,35 ; tahun 1985, 0,57 ; tahun 1990, 0,39 ; dan tahun 1995 menjadi 0,35. Peningkatan efek pengganda nilai tambah yang disertai penurunan efek pengganda kesempatan kerja jelas mengindikasikan bahwa telah terjadi seleksi tenaga kerja yang lebih produktif di sektor agroindustri.

Dengan perkataan lain, sektor agroindustri adalah salah satu ajang peningkatan atau perbaikan efisiensi dalam perekonomian nasional.

LIBERALISASI SEKTOR PERTANIAN

Dalam proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional, yang meliputi berbagai macam aspek dan berbagai macam sektor, juga tidak terkecuali sektor pertanian. Liberalisasi di bidang pertanian ditunjukkan dengan adanya berbagai macam perjanjian yang bertujuan mengatur proses perdagangan hasil-hasil pertanian anatar negara. Persetujuan ini sebenarnya timbul sebagai akibat perbedaan kondisi awal pembangunan sektor pertanian anantara negara maju dan negara berkembang. Elemen pokok kesepakatan di bidang pertanian meliputi

1. Country Schedule

Masing-masing negara menyusun komitmen-nya mengenai rencana dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir periode implementasi (2001 untuk negara maju dan 2004 untuk NSB) yang terdiri atas kesepakatan tentang Non tariff Barriers (NSB), Penurunan tariff dan Akses Pasar Penurunan Aggregate Measure of Support (AMS)

2. Akses Pasar

Kesepakatan tentang pengaturan kebijakan-tarif (*tariffication* dan penurunan *tariff*) meliputi 15 % dalam waktu 6 tahun untuk negara maju, 10 % dalam waktu 10 tahun untuk NSB, LDC dikecualikan, Ada ketentuan "Special safeguards". Komitmen tentang akses pasar diatur dengan memberi hak dan kemudahan untuk memasuki pasar negara lain. Apabila nilai import-nya sangat kecil, harus membuka pintu impor. Suatu minimum akses sebesar 3 % dari konsumsi dalam negeri dan ditingkatkan menjadi 5 % pada tahun 2001

bagi negara maju dan tahun 2004 bagi NSB

3. Kesepakatan Aggregate Measure of Support (AMS)

Kepakatan untuk menurunkan secara progresif besarnya AMS diatur dengan ketentuan tentang (1) Pengelompokan macam-macam dukungan terhadap pertanian, (2) Yang penting yang masuk "green box policies" dikecualikan dari komitmen penurunan AMS, (3) Persyaratan "de minimis" untuk bisa dikecualikan dari komitmen.

4. Kesepakatan Tentang Subsidi Ekspor

Kepekatan untuk menurunkan subsidi ekspor untuk 22 macam komoditi pertanian merupakan kesepakatan yang diharapkan dapat membantu persiapan negara-negara sedang berkembang. Kesepakatan tersebut meliputi penurunan 21 % dalam volume dan 36 % dalam nilai selama 6 tahun bagi negara maju dan 14 % dalam volume dan 24 % dalam nilai selama 10 tahun bagi NSB

5. Perjanjian Sanitary Phyto Sanitary (SPS)

Untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan kondisi tanaman setiap negara anggota serta sebagai acuan bagi masing-masing negara dalam menetapkan persyaratan SPS kearah suatu harmonisasi sistem yang diharapkan akan memperlancar perdagangan, maka masing-masing negara menetapkan ketentuan SPS yang berlaku bagi negaranya dengan mengacu pada ketentuan (1) Codex Alimentarius Aommission (CAC), (2) International Office of Epizootic (IOE) untuk ternak, (3) International plant Protection Convention (IPPC). Kesepakatan tersebut dilandasi oleh prinsip dan kajian ilmiah (*scientific justification*) tanpa menimbulkan hambatan terselubung bagi perdagangan

BEBERAPA ISU (ISSUES) PENTING PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN AGRIBISNIS DI INDONESIA

Ada beberapa isu penting yang harus dipecahkan dalam pembangunan sektor agribisnis (lihat juga Saragih, 1997). *Pertama* isu yang menjadi sangat kritis sebenarnya adalah sikap bisnis sebagian besar petani yang selama ini terbiasa dengan bisnis gurem dan informal. Dalam kebiasaan yang hidup subsisten dan oleh pengaruh eksternal yang terlalu sulit untuk ditembus, walaupun tetap berpikir rasional, mereka hidup dalam ruang pengambilan keputusan (*decision space*) yang sempit. Menjaga mutu barang, menepati janji waktu penyampaian barang dan transaksi, serta mempertahankan posisi tawar baik melalui organisasi pengusaha tani maupun bentuk organisasi ekonomi lainnya cenderung dianggap mahal.

Isu *kedua* menyangkut sifat-sifat agribisnis berbagai komoditas pertanian yang berbeda satu sama lain seperti telah dicontohkan di muka. Beberapa komoditas bisa dusahakan dalam skala besar atau *estate* sedangkan beberapa lainnya harus selalu dalam skala kecil. Beberapa indikator tersebut adalah kepadatan-karya (*laboir intensive*), kemudah-busukan (*perishabilitu*), kondisi khusus agrofisik lingkungan tropis, dan sebagainya. Hal ini akan berkaitan pula dengan pengendalian atau manajemen pasokan ke pasar. Salah satu implikasinya adalah perlunya organisasi pengusaha tani yang di negara-negara yang maju pertaniannya, kemampuan berorganisasi petaniannya sudah sangat handal.

Isu *ketiga* menyangkut penguasaan teknologi pada tingkat *on farm dan off farm agribusiness*, serta teknologi informasi Kesulitan dalam pengendalian mutu komoditas pertanian serta manajemen pasokan ke pasar sebenarnya disebabkan oleh rendahnya tingkat teknologi yang dikuasai oleh pelaku-pelaku agribisnis..

Dalam kaitan ini pula, seperti dikemukakan oleh Crawford (1991), dalam tahap-tahap perkembangan ekonomi, pada waktunya akan tercapai tahap ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan atau informasi (*knowledge/information economy*); setelah melalui tahap industrialisasi (*industrial economy*). Nuansa agribisnis juga akan berubah yang efisiensi dalam *on farm dan off-farm agribusiness* serta produktivitas sumber daya manusianya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam teknologi dari para pelaku agribisnis.

Isu *keempat*, dalam konsep agribisnis yang pertama kali diperkenalkan di Asia Tenggara oleh Drilon Jr. (1971) ada yang disebut sebagai *agribusiness coordinators* (koordinator agribisnis) yang meliputi pejabat pemerintah, para pakar dan mahasiswa, manajer-manajer, serta para peneliti dan pengembang. Peran para koordinator agribisnis ini akan sangat menentukan dalam upaya merubah sikap berbisnis, penguasaan teknologi dan informasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan agribisnis..

Isu *kelima*, adalah yang menyangkut kelembagaan dan kebijaksanaan terkait.. Harus ada kepemilikan yang memberi kesempatan kepada petani kecil dan usaha rumah tangga untuk melibatkan diri dan menguasai sebagian dari kegiatan agribisnis hulu dan hilir agar produktivitas mereka bisa secara nyata meningkat. Pendekatan kebijakan pemerintah sebaiknya adalah bukan kesejahteraan (*income approach*) tetapi pendekatan peningkatan produksi (*production approach*) dengan berbagi macam perubahan proses produksi dan perluasan akses pasar.

Isue *keenam* adalah rendahnya term of trade dari produk-produk hasil pertanian tersebut. Ini bisa diatasi dengan adanya perubahan hasil-hasil produk pertanian yang dapat dipasarkan di luar negeri dengan cara

peningkatan kualitas fisik maupun daya tahan produk.

Isue ketujuh, adalah reendahnya komitmen bagi pemerintah untuk menggerakkan sektor pertanian dan agribisnis dalam rangka menumbuhkan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh rendahnya multiplier effect yang ditimbulkan oleh sektor ini relatif rendah.

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SEBAGAI PARADGIMA BARU

Untuk mengembangkan sektor agribisnis perlu adanya kebijakan yang baru sehingga dapat menunjang pembangunan di sektor tersebut, sehingga keunggulan yang dimiliki dapat lebih bermanfaat. Berbagai keunggulan agribisnis/agroindustri seperti disebut di muka jelas bisa dijadikan dasar untuk menetapkan pengembangan agroindustri, paling tidak, sebagai suatu andalan (*a leading sector*) dalam era industrialisasi pada abad ke-21 mendatang (Saragih, 1997) yaitu :

1. *Broad-base industry* yang lebih banyak mengandalkan *footlose industry* dan substitusi impor yang dalam kenyataannya selama ini banyak sekali membebani neraca pembayaran luar negeri kita karena komponen impor yang sangat tinggi. Kebijakan industrialisasi seperti ini juga telah terbukti tidak banyak menolong dalam memperluas kesempatan kerja di luar sektor pertanian dan pedesaan. Alih teknologi dari *footlose industry* tersebut, seperti otomotif, selama 25 tahun juga ternyata tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Bagaimanapun juga, negara asal teknologi dalam *footlose industry* tersebut tidak akan melepas seluruh teknologinya dan tetap berusaha mendapatkan rente (*economic rent*) dari teknologi yang diciptakan tersebut ;

2. *Hi-tech industry*, yang dengan kapasitas sumber daya manusia kita yang ada dewasa ini, ternyata sangat terbatas kemampuannya untuk diterapkan. Harapan-harapan untuk menguasai *low and intermediate technology* ternyata masih jauh dari yang diharapkan bahkan diperlukan dukungan sektor lain untuk pembiayaannya.
3. Perluasan akses pasar ke berbagai negara yang dapat ditembus. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah jika ada komitmen yang tinggi tentang pengembangan sektor agribisnis. Dengan adanya otonomi daerah, sehingga keleluasaan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan makin besar harus digunakan untuk membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi pengembangan agribisnis.

DAYA SAING (*COMPETITIVENESS*)

Kunci dalam meningkatkan daya saing adalah : produktivitas, efisiensi, mutu barang dan transportasi. Kalau kita tarik kebelakang, dibalik keempat faktor tersebut, semuanya akan dipengaruhi oleh kegiatan proses produksi sejak dari hulu sampai dengan produk akhir, termasuk didalamnya cara-cara pengorganisasian produksi dan struktur pasar. Di atas semua itu faktor-faktor upah dan produktivitas tenaga kerja, kondisi prasarana dan kondisi lingkungan usaha merupakan faktor-faktor diluar badan usaha yang sangat besar pengaruhnya pada daya saing usaha. Pada dasarnya dalam kenyataan yang bersaing bukannya pemerintah akan tetapi perusahaan - perusahaan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Oleh karena itu salah satu komponen penting untuk meraih daya saing yang kuat adalah "*good management practice*" yang harus menjadi pegangan utama pelaku-pelaku business. Salah satu komponen penting adalah kegiatan R & D dan inovasi. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah

menciptakan "suasana" yang kondusif bagi dunia usaha untuk melaksanakan peranannya dengan baik. Untuk meningkatkan daya saing dihadapkan pada keharusan untuk memilih sektor dan komoditi andalan yang ingin kita kembangkan. Tabel berikut menunjukkan nilai *Revealed Advantage (RCA)* dan *Competitive Index (CI)* industri manufaktur menengah/besar menurut klasifikasi 2-digit ISIC dapat dicermati pada tabel 4.

Dengan menggunakan tabel tersebut dapat mengkonsentrasikan pada kelompok industri yang memiliki index *competitiveness* yang positif sebagai sasaran strategik untuk perbaikan daya saing kita. Demikian pula produk-produk yang spesifik serta memiliki segmen pasar yang unik seperti hasil-hasil kerajinan merupakan andalan ke depan. Produk-produk pertanian dan olahannya merupakan komoditi yang memberikan harapan. Namun pada waktu sekarang, dampak dari kesepakatan Uruguay Round/ WTO belum dapat dirasakan secara penuh, karena periode pelaksanaan komitmen belum sampai pada batas waktu, yaitu tahun 2001 untuk negara-negara maju dan tahun 2004 untuk negara-negara berkembang. Diharapkan penghapusan *Non Tariatf Barries (NTB)*, penurunan tariff, perbaikan akses pasar dan pengurangan *Aggregate Measures of Support (AMS)* serta penurunan subsidi ekspor akan memperbaiki daya saing produk-produk pertanian kita. Pada sisi lain kita menghadapi tantangan dari segi persyaratan standart kualitas, utamanya SPS dan persyaratan ISO yang masih harus kita penuhi.

Dalam pada itu, dalam suasana globalisasi ekonomi, untuk memilih sektor/ komoditi andalan, tidak hanya ketentuan-ketentuan GAAT/WTO saja harus diperhatikan dan dimanfaatkan. Strategi dan tingkah laku FDI (*Foreign Direct Investment*) dan MNC (*Multinational Corporations*) harus kita perhatikan dan selanjutnya kita manfa-

atkan. Strategi MNC misalnya untuk menempatkan produksi di beberapa negara atas landasan dimana yang paling murah, harus kita songong dengan baik. Ada trend "economies of scale" digantikan oleh "economies of network" (Djisman S. Si-manjutak). Tidak ada salahnya, kita meng-konsentrasikan pada pengembangan industri komponen, menjadi pemasok yang unggul dalam konteks global.

FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA SAING

Ada beberapa faktor yang mem-pengaruhi daya saing sebuah produk, maupun daya saing suatu daerah dalam pengembangan perekonomiannya. Beberapa studi seperti Kuncoro (1997) menunjukkan bahwa unit usaha memilih suatu daerah dan jenis usaha yang memiliki sarana dan pra-sarana serta faktor lain agar prduknya dapat memiliki daya saing tinggi. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Prasarana Fisik

Pengalaman dan pengamatan riil menunjukkan bahwa tersedianya prasarana dalam bentuk penyediaan tenaga listrik yang tidak terputus-putus merupakan faktor penting mengapa seorang investor memilih suatu daerah. Studi Bank Dunia secara tidak langsung juga mengkonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bahwa variabel yang menentukan perbedaan pendapatan antar daerah adalah infrastruktur.

2. Keanekaragaman Lingkungan Usaha

Faktor penting yang membuat suatu unit usaha memilih suatu daerah adalah telah adanya kegiatan industri tersebut di masa lalu. Adanya lingkungan industri yang sejenis akan menurunkan ketidakpastian ter-utama mengenai informasi pasar, penyediaan input dan arah inovasi. Hal lain yang penting disini adalah kematangan lingkungan industri. Suatu lokasi yang didominasi oleh

perusahaan-perusahaan yang telah berkecimpung lama dalam bidang usaha tersebut merupakan pertanda kematangan daerah tersebut.

3. Iklim Usaha

Secara empiris agak sukar untuk menangkap iklim usaha dari suatu daerah. Dengan menggunakan suatu indeks yang di-susun dari biaya-biaya yang tidak berhu-bungan langsung dengan produksi dapat ditunjukkan bahwa unit-unit usaha di sektor manufaktur pada tahun 1990-an mulai di-pengaruhi oleh perbedaan iklim usaha antar daerah seperti yang terjadi jika model ini diaplikasikan pada kasus antarnegara. Dengan makin luasnya desentralisasi per-ijinan ke daerah, maka perbedaan pungutan yang dilakukan oleh birokrasi daerah mulai mempengaruhi pola pemilihan lokasi.

4. Akses

Berlainan dengan negara-negara lain seperti Eropa, Jepang dan USA dimana faktor akses ke pusat-pusat bisnis tidak begitu mempengaruhi pola lokasi investasi, di Indonesia pengaruh akses ini sangat kuat. Kedekatan dengan lokasi institusi pemberi ijin tampaknya masih menjadi pertimbangan utama pemilihan lokasi.

5. Inovasi Teknologi

Dengan adanya penguasaan teknologi baru, maak akan dapat meningkat-kan kualitas output dan peningkatan pro-dukstifitas input. Inovasi teknologi dapat dilakukan dengan adanya komitmen inves-tasi pada pengembangan *research and de-velopment*.

6. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas SDM meru-pakan kebijakan yang tak dapat ditunda, karen hanya dengan kualitas SDM yang handal, maka proses produksi akan berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Arsyad, (1997), "Transformasi Struktur Perekonomian Indonesia: Pola dan Potensi", dalam Mari Pangestu dan Ira Setiati (Penyunting) *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Azis, Iwan Jaya, (1991), "Key Issues in Regional Development", dalam Hal Hill (eds) *Unity in Diversity: Regional Development in Indonesia Since 1970*, Oxford University Press.
- Crawford, R, (1991) *In The Era of Human Capital ; The Emergence of Talent, Intelegence and Knowladgeas The Worldwide-Economic Force and What It Means to Amnagers and Investors*. Harper, USA.
- International Monetary Fund, (1992), *Macroeconomic Adjustment: Policy Instruments and Issues*. Washington, D.C.
- Kuncoro. Ari, (1997), "Tantangan Global dan Paradigma Pembangunan", dalam Mari Pangestu dan Ira Setiati (Penyunting) *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Pangestu, Mari. (1997), "Pembangunan Regional, Daya Saing Antar Daerah dan Pembangunan Kawasan Tertinggal", dalam Mari Pangestu dan Ira Setiati (Penyunting) *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Sachs, J.D dan Wagner, A., (1995), "Economic Reform and The Process of Global Integration", *Brookings Economic Papers on Economic Activity*, 1.
- Saragih, Bungaran, (1997), "Transformasi Sektor Pertanian: Mencari Paradigma Baru", dalam Mari Pangestu dan Ira Setiati (Penyunting) *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- World Bank, (1996), *Global Economic Prospects for Developing Countries*, Washington D.C.

Tabel 1
 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia
 Menurut Sektor Produksi 1985 - 1995
 (Atas Dasar Harga Konstan 1993)

	Laju Pertumbuhan (% / Per Tahun)				
	1985-95	1990-95	1988-95	1988-93	1993-95
A. Pertanian	3,50	3,04	3,31	3,74	2,24
1. Tanaman Bahan Makanan	2,12	1,67	1,96	2,31	1,10
2. Tanaman Perkebunan	6,96	6,47	7,12	7,99	4,98
3. Peternakan Dan Hasilnya	5,66	5,71	6,20	7,07	4,08
4. Kehutanan	2,84	1,05	1,33	1,76	0,25
5. Perikanan	5,61	5,34	5,07	5,31	4,48
B. Industri	9,54	10,25	10,44	10,31	10,76
I. Pertambangan Dan Penggalan	5,14	5,71	6,09	6,27	5,63
1. Minyak dan Gas Bumi	2,08	1,70	2,59	3,11	1,29
2. Pertambangan Lainnya Dan Penggalan	19,06	18,79	18,88	19,73	16,79
II. Industri Manufaktur	10,98	11,14	11,28	11,07	11,79
1. Industri pengilangan MIGAS dan pengolahan lebih lanjut hasil pengilangan MIGAS.	5,49	2,97	4,40	5,50	1,70
2. Industri manufaktur selain pengilangan MIGAS dan pengolahan hasil pengilangan MIGAS.	11,93	12,47	12,43	12,10	13,26
a. Makanan, Minuman, dan Tembakau.	11,73	16,42	12,99	11,17	17,66
b. Industri tekstil, pakaian kulit, barang kulit.	12,08	8,96	11,04	12,00	8,86
c. Industri kayu/plywood, perabotan dari kayu	7,66	4,80	6,15	6,83	4,44
d. Industri kertas dan barang dari kertas.	16,33	11,56	15,05	15,41	14,15
e. Industri yang berkaitan dengan kimia *selain pengilangan dan pengolahan MIGAS	12,79	13,14	13,97	15,09	11,21
f. Industri barang dari mineral bukan logam**	12,58	15,72	14,31	16,21	20,00
g. Industri logam dasar***	13,70	8,27	10,59	9,98	12,14
h. Industri barang dari logam, mesin, alat pengangkutan, peralatan untuk profesional dan ilmu pengetahuan, fotografi, barang optik.	12,61	8,53	13,55	15,58	8,61
i. Industri yang tidak termasuk di atas.	17,66	13,97	18,54	21,44	11,60
III. Listrik, Gas dan Air	13,94	11,29	12,74	12,21	14,07
IV. Bangunan	11,68	13,90	14,23	14,38	13,87

dilanjutkan ke halaman 142

	Laju Pertumbuhan (% / Per Tahun)				
	1985-95	1990-95	1988-95	1988-93	1993-95
C. Jumlah A + B	7,45	7,94	8,05	8,00	8,19
D. Jasa	8,23	7,58	8,27	8,70	7,21
I. Perdagangan, Restoran, Hotel	9,60	8,91	9,46	10,24	7,53
1. Perdagangan	9,60	8,66	9,31	10,18	7,17
2. Restoran dan Hotel	9,36	9,96	10,07	10,48	9,06
II. Pengangkutan dan Komunikasi	10,62	8,00	8,56	9,77	8,06
1. Pengangkutan	8,18	6,69	7,51	8,15	5,94
2. Komunikasi	7,28	16,35	15,39	13,34	20,70
III. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan.	14,44	9,88	11,97	12,49	10,70
IV. Jasa lainnya	10,07	3,40	3,72	4,00	3,02
E. Produk Domestik Bruto	4,97	7,79	8,15	8,29	7,77
I. Produk Domestik Bruto Migas	7,77	2,07	3,20	3,79	1,41
II. Produk Domestik Bukan Migas	2,98	8,45	8,75	8,87	8,46
Migas	8,40				

Sumber : Anwar (1997: 35)

Tabel 2

Perkembangan Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia (I) Menurut Sektor Produksi Serta Struktur Nilai Tambah Bruto (II) Sektor Pertanian dan Industri Manufaktur (Atas Dasar Harga Konstan 1993) 1985-1995 (dalam persen)

	Struktur Produk Domestik Bruto							
	Tahun 1985		Tahun 1988		Tahun 1993		Tahun 1995	
	(i)	(ii)	(i)	(ii)	(i)	(ii)	(i)	(ii)
A. Pertanian	24,12	100,00	22,16	100,00	17,88	100,00	16,09	100,00
1. Tanaman Bahan Makanan	14,68	60,85	12,93	58,33	9,73	4,43	8,56	53,22
2. Tanaman Perkebunan	2,80	11,6	2,77	12,51	2,73	15,29	2,59	16,12
3. Peternakan Dan Hasilnya	2,14	8,87	1,99	8,89	1,88	10,52	1,75	10,90
4. Kehutanan	2,63	10,90	2,59	11,70	1,90	10,63	1,64	10,22
5. Perikanan	1,88	7,79	1,88	8,47	1,63	9,13	1,53	9,54
B. Industri	35,64		36,18		39,68		41,91	
I. Pertambangan Dan Penggalian	11,75		10,50		9,55		9,18	
1. Minyak dan Gas Bumi	10,65		8,96		7,01		6,19	
2. Pertambangan Lainnya Dan Penggalian	1,10		1,54		2,54		2,98	
II. Industri Manufaktur	17,90	100,00	19,65	100,00	22,30	100,00	24,00	100,00
1. Industri pengilangan MIGAS dan pengolahan lebih lanjut hasil pengilangan MIGAS.	3,28	18,30	3,38	17,22	2,97	13,31	2,64	11,02
2. Industri manufaktur selain pengilangan MIGAS dan pengolahan hasil pengilangan MIGAS.	14,63	81,70	16,27	82,78	19,34	86,69	21,35	88,98
a. Makanan, Minuman, dan Tembakau.	6,77	37,81	7,14	36,34	8,15	36,52	9,71	40,45
b. Industri tekstil, pakaian kulit, barang kulit.	1,42	7,93	1,75	8,88	2,07	9,26	2,10	8,75
c. Indus. kayu/plywood, perabotan dari kayu	1,50	8,40	1,70	8,62	1,58	7,10	1,49	6,20
d. Industri kertas dan barang dari kertas.	0,42	2,34	0,58	2,96	0,80	3,59	0,90	3,74
e. Industri yang berkaitan dengan kimia *selain pengilangan dan pengolahan MIGAS	1,74	9,71	1,90	9,66	2,57	11,54	2,74	11,42
f. Industri barang dari mineral bukan logam**	0,48	2,69	0,51	2,57	0,60	2,69	0,74	3,10
g. Industri logam dasar***	0,45	2,49	0,65	3,31	0,70	3,15	0,76	3,17
h. Industri barang dari logam, mesin, alat pengangkutan, peralatan untuk profesional dan ilmu pengetahuan, fotografi, barang optik.	1,80	10,04	1,98	10,09	2,75	12,31	2,79	11,62
i. Industri yang tidak termasuk di atas.	0,05	0,29	0,07	0,33	0,12	0,52	0,13	0,52
III. Listrik, Gas dan Air	0,64		0,84		1,00		1,12	
IV. Bangunan	5,34		5,19		6,83		7,62	

dilanjutkan ke halaman 144

	Struktur Produk Domestik Bruto							
	Tahun 1985		Tahun 1988		Tahun 1993		Tahun 1995	
	(i)	(ii)	(i)	(ii)	(i)	(ii)	(i)	(ii)
C. Jumlah A + B	59,76		58,34		57,56		58,00	
D. Jasa	40,24		41,66		42,44		42,00	
I. Perdagangan, Restoran, Hotel	14,12		15,34		16,77		16,69	
1. Perdagangan	11,56		12,41		13,53		13,37	
2. Restoran dan Hotel	2,56		2,93		3,24		3,32	
II. Pengangkutan dan Komunikasi	6,83		6,90		7,05		7,09	
1. Pengangkutan	6,17		6,14		6,10		5,89	
2. Komunikasi	0,66		0,76		0,95		1,20	
III. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	7,27		7,03		8,51		8,97	
IV. Jasa lainnya	12,04		12,38		10,12		9,24	
E. Produk Domestik Bruto	100,00		100,0		100,0		100,0	
I. Produk Domestik Bruto Migas	13,93		12,34		9,98		8,84	
II. Produk Domestik Bukan Migas	86,07		87,66		90,02		91,16	

Sumber : Anwar (1997: 36)

Tabel 3
Kontribusi Agroindustri dalam Perekonomian Nasional 1971-1995

Uraian	1971	1975	1980	1985	1990	1995
Pangsa terhadap Nilai Tambah						
Industri Nonmigas (%)	62,7	64,3	65,5	66,6	62,13	68,7
Pangsa terhadap Ekspor						
Industri Nonmigas (%)	79,2	45,5	47,4	75,4	80,74	80,74
Pangsa terhadap Impor						
Industri Nonmigas (%)	26,4	26,3	28,2	28,6	32,13	31,63
Pangsa terhadap Kesempatan Kerja Nonmigas (%)	75,6	63,1	70,7	79,4	75,04	74,95
Multiplier Nilai Tambah	0,87	0,83	2,24	2,31	2,91	3,23
Multiplier Kesempatan Kerja	6,87	2,98	0,35	0,57	0,39	0,35
Sumber Pertumbuhan Utama	KS	KS	KS	KS	KS	KS

Sumber : Saragih, (1996: 108)

Tabel 4
Competitive Index dan RCA Industri Manufaktur Menengah-Besar, 1996

ISIC	Industri	CI	RCA
31	Industri makanan, minuman dan tembakau	0.158	1.147
32	Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	0.310	2.230
33	Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya	0.691	8.814
34	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	0.195	1.601
35	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik	-0.089	1.019
36	Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	-0.044	0.717
37	Industri logam dasar	-0.601	0.372
38	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	-0.419	0.428
39	Industri pengolahan lain	0.334	0.891

Sumber : Statistik Ekspor Impor 1996, BPS, diolah